

STRATEGI PENANGANAN PENYEBARAN INFORMASI HOAKS DI MEDIA SOSIAL OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

ELSAN OKTOVIAN LANIE

NPP. 30.1238

Asdaf Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: elsanoktovian12@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background: *The spread of hoax information on social media is common in Poso Regency due to the nature of social media that can be accessed by anyone so that some people create anonymous accounts and then spread hoax information to the public. Lack of public awareness is also one of the causes of hoax news. The theory used in this study, according to James Brian Quinn (1998:5), explains that strategy is a form of planning that integrates objectives, policies and programs in a synchronous relationship. The strategy which is then formulated in a planned manner aims to be able to assist in the preparation of allocating all the resources contained in a company into a complete and sustainable form.***Purpose:** *The analysis was carried out to find out the factors that influence the spread of hoax information and the strategies carried out by the Poso District Communication and Information Office in dealing with the spread of hoaxes on social media.***Method:** *This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection technique used is by using interview techniques, observation and documentation while the data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and making conclusions.***Results:** *Based on the results of research on hoax handling strategies in Poso Regency. The results of the study show that the Ministry of Communication and Information has been good at handling hoaxes, seen from the objectives, policies and programs made by the Ministry of Communication and Information in eradicating hoaxes.***Conclusion:** *Then the factors that cause the spread of hoax information are technological factors and political factors.*

Keywords: *Handling ,Hoax, and Strategy*

Abstrak

Permasalahan/Latar Belakang: Penyebaran informasi hoaks di media sosial banyak ditemukan di Kabupaten Poso yang disebabkan karena sifat media sosial yang bisa diakses siapa saja sehingga beberapa orang membuat akun anonim kemudian menyebarkan informasi hoaks ke masyarakat. kurangnya kesadaran masyarakat juga merupakan salah satu penyebab terjadinya berita hoaks. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut James Brian Quinn (1998:5), menjelaskan bahwa strategi merupakan Suatu bentuk perencanaan yang Mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan program dalam hubungan yang sinkron. Strategi yang kemudia di formulasikan dengan terencana bertujuan agar dapat membantu penyusunan dalam pengalokasian seluru sumber daya yang terdapat pada suatu perusahaan menjadi bentuk utuh serta mampu bertahan. **Tujuan:** Analisis dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran informasi hoaks serta strategi yang dilakukan oleh dinas kominfo Kabupaten Poso dalam menangani penyebaran hoaks di media sosial. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang di gunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan membuat kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi penanganan hoaks di Kabupaten Poso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas kominfo sudah baik dalam menanganini hoaks dilihat dari Tujuan, Kebijakan dan program yang di buat kominfo dalam memberantas hoaks. **Kesimpulan:** Kemudian faktor penyebab terjadinya penyebaran informasi hoaks adalah faktor teknologi dan faktor politik.

Kata-kata Kunci: Hoaks, Penanganan, dan Strategi



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang dari masa ke masa. Informasi yang dulunya disalurkan melalui surat kabar, Koran atau majalah kini dengan adanya teknologi, informasi dapat disebarluaskan melalui jaringan internet sehingga dalam hitungan detik informasi mudah di peroleh. Kemudahan dalam mendapatkan informasi dapat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan teknologi juga terjadi di Indonesia, hal ini ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi komunikasi (TIK) yang membuat seakan tidak ada batasan waktu dan jarak dalam berkomunikasi. Dengan terjadinya perkembangan TIK tentunya pemerintah juga dipermudah dalam proses penyebaran informasi publik secara meluas serta dapat menghasilkan, menyimpan serta mengelola informasi yang di terima dari suatu badan publik agar dapat membantu lembaga dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka

Informasi publik dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yaitu Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dapat diketahui juga bahwa informasi publik merupakan sebuah hak asasi yang fundamental dimana seluruh masyarakat dapat mengakses semua informasi publik dengan proses yang cepat dan biaya yang tidak mahal serta tidak adanya kesulitan dalam memperoleh informasi publik. Adapun informasi publik yang sifatnya tertutup (rahasia) yang tercantum pada pasal 2 ayat (4) undang-undang no 14 tahun 2008 dikatakan bahwa Informasi Publik yang tidak bisa di akses atau bersifat tertutup sesuai dengan Undang-Undang, yang berlaku tentang kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang dampak yang timbulkan jika sebuah informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dalam proses penyebaran informasi, pemerintah sangat mudah dalam menyampaikan informasi bisa dilihat pada tahun 2021 Survei Literasi Digital Nasional, menyatakan bahwa 76,0% masyarakat di Indonesia dapat mengakses informasi melalui media sosial kemudian

59,5% melalui Televisi dan 25,2% melalui Berita online, kemudian 14,0% disusul oleh situs web resmi pemerintah dan 9,7% media cetak 2,6% radio serta 2,0% lainnya Hal ini dikarenakan masyarakat lebih banyak menggunakan media sosial dibandingkan dengan media lainnya dengan alasan bahwa media sosial mempunyai informasi dan nilai yang jelas dan lengkap.

dari hasil survey menunjukkan bahwa media sosial merupakan akses kebanyakan masyarakat dalam mendapatkan informasi dikarenakan media sosial saat ini sudah menjadi platform yang sangat diminati dalam media komunikasi

Media sosial saat ini sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dimana masyarakat dapat berkomunikasi dengan kerabat yang jauh serta dapat membagi hingga mencari informasi lewat media sosial maka, bukan hal yang lumrah jika sebagian orang mengatakan bahwa media sosial merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat.

Tidak hanya berdampak positif akan tetapi penggunaan media sosial juga mempunyai dampak negative dimana informasi yang beredar terkadang tidak sesuai dengan fakta. cepatnya informasi yang tersebar membuat masyarakat harus tetap teliti dan bijak dalam memilah berita yang belum jelas dari mana asalnya. Penyebaran berita bohong ini sering disebut dengan hoaks yakni penyebaran informasi yang tidak jelas kebenarannya, hal ini dikarenakan masyarakat sangat terburu buru dalam menyebarkan informasi sehingga sering terjadi *disinformasi* yang beredar di masyarakat

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Maraknya penyebaran berita hoax salah satunya dikarenakan jumlah akses sebuah web semakin meluas sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi hoaks ditambah lagi dengan belum adanya tindak tegas yang dilakukan terhadap oknum penyebar hoaks. Bisa Dilihat dari artikel yang diterbitkan oleh website kominfo.go.id bahwa ada sekitar 800.000 website penyebar hoaks di Indonesia yang didasari karena informasi yang asli bisa diubah dengan cepat dan kemudian dibuat sedemikian rupa agar menyerupai lalu disebarluaskan secara meluas sehingga menyebabkan informasi menjadi simpang siur di kalangan masyarakat. kemudian diiringi dengan pertumbuhan penggunaan media sosial yang semakin tahun semakin bertambah tercatat pada tahun terakhir bahwa penggunaan media sosial internet di Indonesia mencapai 127,7 juta orang. Untuk menghentikan penyebaran bohong (hoaks) di media sosial masyarakat dihimbau agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas asalnya

Media sosial merupakan akses terbesar dalam penyebaran informasi mengingat bahwa masyarakat sekarang cenderung lebih mudah untuk mendapatkan informasi melalui media sosial. Penggunaan media sosial diharapkan dapat mendekatkan hubungan dengan masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pelayanan pemerintah daerah. Media sosial yang digunakan dengan mudah oleh masyarakat dan melalui internet, telah membentuk kumpulan jaringan yang tetap, sehingga memudahkan interaktif melalui audio dan video tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal.

Peningkatan media sosial juga terjadi di provinsi Sulawesi tengah dimana tercatat bahwa masyarakat provinsi Sulawesi tengah lebih mempercayai informasi yang beredar di media sosial ketimbang dari website pemerintah bisa dilihat dari survey bahwa penggunaan media sosial facebook menduduki peringkat pertama sebagai media sosial yang banyak dimiliki oleh masyarakat di provinsi Sulawesi tengah

Survey membuktikan bahwa masyarakat di provinsi Sulawesi tengah hampir semua mempunyai media sosial facebook sekitar 93,8% kemudian diikuti whatsapp 80,8% kemudian youtube 65,4% instagram 42,3% dan tiktok 33,8% serta line dan twiter memiliki pengguna yang rendahnya sekitar 5-13%. jadi tidak menutup kemungkinan bahwa facebook merupakan media sosial yang digunakan untuk mencari informasi akan tetapi facebook juga menjadi salah satu media sosial yang di gunakan untuk menyebarkan berita hoax

Penyebaran berita hoax di provinsi Sulawesi tengah sudah terjadi sejak 2018 dimana saat gempa dan tsunami di kota palu banyaknya berita hoax yang tersebar hal ini membuat presiden joko widodo pun merasa resah dengan informasi yang asal asalan sehingga presiden mengintruksikan kepada kapolri untuk menangkap pelaku penyebar hoaks. Berita-berita hoaks pun berdatangan mulai dari foto korban gempa yang terjadi di aceh pada 2004 yang di sebarluaskan kemudian di jadikan dokumentasi sebagai korban tsunami palu, hingga hoaks mengenai akan datangnya gempa susulan yang membuat warga Sulawesi tengah menjadi resah dan khawatir karena faktanya tidak ada negara satu pun yang dapat memprediksi dengan pasti kapan akan datangnya gempa, maraknya berita hoaks yang terjadi di Sulawesi tengah merambat ke Kabupaten sekitarnya di mana Kabupaten Poso juga menerima berita berita hoaks mulai dari perihal ekonomi hingga politik hal ini membuat masyarakat Poso semakin khawatir mengingat bahwa pemilihan umum sebentar lagi diadakan yang ditakutkan bahwa Kemunculan berita hoaks dapat menimbulkan konflik yang terjadi antar

golongan yang dapat memecah belahkan masyarakat karena di harapkan pemilihan umum dapat dirayakan dengan gembira tanpa ada masalah sedikit pun

Penyebaran berita hoaks di Kabupaten Poso menjadi permasalahan yang tidak bisa di sepelekan hal ini diakibatkan karena kurangnya penyaringan berita yang didapatkan membuat masyarakat Poso sangat mudah termakan hoaks kemudian di tambah lagi dengan pihak yang berwenang belum menindak tegas pelaku pembuat hoaks sehingga pihak yang tidak bertanggung jawab semakin bebas menyebarkan berita palsu salah satu contohnya seperti mengenai informasi ujaran kebencian hingga paham radikalisme. berbagai upaya telah dilakukan untuk menanganinya masalah ini dan tidak bisa di pungkiri bahwa dinas komunikasi dan informatika mempunyai peranan penting dalam menangani kasus penyebaran berita hoaks yang tersebar di media sosial, hanya dengan melakukan klarifikasi dan menambahkan beberapa arahan kepada masyarakat merupakan hal yang cukup. Karena kedepannya teknologi akan selalu berkembang maka penyebaran informasi juga semakin mudah dan cepat, tentunya dengan sejumlah strategi dan solusi harus di persiapkan.

1.3 Penelitian Terdahulu

1. Nanda Ayu Rizqyah Devi (Skripsi, 2019)¹ dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Mulawarman tentang “Upaya Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Dalam Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Media Online Di Samarinda”. Dengan metode Deskriptif-Kualitatif dan Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan diskominfo yaitu melakukan sosialisai mengenai berita hoax berupa dialog publik yang dihadiri masyarakat setempat yang dilingkungan sekitar gor Segiri serta membuat Forum Anti Hoax yang dibentuk oleh jurnalis anti hoax untuk menjadi wadah dimana masyarakat dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim bisa saling berdiskusi.
2. Asriadi (Skripsi,2019)² dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) tentang “Startegi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Dalam Menangani Berita Hoaks Dilembaga Penyiaran Publik”. Dengan metode Kuantitatif dengan pendekatan observasi dan hasil penelitian menjelaskan bahwa dinas kominfo kota Parepare dalam menangani penyebaran berita hoax dengan melakuakn Program Iklan layanan

¹ Devi, N. A. R. (2019). Upaya Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Dalam Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Media Online Di Samarinda. Ejournal, 7(4), 1553–1566.

² Arsiandi. (2019). Strategi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Dalam Menangani Berita Hoax Di Lembaga Penyiaran Publik. 5–10.

masyarakat agar masyarakat lebih teliti dalam menerima informasi atau isu-isu yang sedang viral.

3. Sabri (Skripsi, 2021)³ dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar tentang “Strategi Komunikasi Dinas Kominfo Sulawesi Selatan Dalam Pencegahan Penyebaran Informasi Hoax Di Media Sosial”. Dengan metode Kualitatif pendekatan deskriptif dan Penelitian ini menjelaskan mengenai Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Selatan untuk mencegah konten hoaks di media sosial dijelaskan dalam temuan penelitian dengan menganalisis dalam tiga cara: psikologis, sosio-demografis, karakteristik, dan pengumpulan pesan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Adapun perbedaan hal yang mendasar pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, dapat dilihat berikut :

1. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah upaya dalam penanganan hoaks yang menggunakan teknik sosialisasi. Persamaan penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles.
2. Perbedaan penelitian yang dilakukan sekarang adalah lebih memfokuskan keada upaya diskominfo dalam menangani berita hoax. Perbedaan lainnya yaitu berupa fokus dari penelitian dan juga metode dari penelitian yang di pilih adapun kesamaan dari pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Serta melakukan metode pendekatan deskriptif.
3. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu penekanan langkah yang akan diteliti berupa langkah pencegahan atau langkah preventif persamaan penelitian terdapat pada metode pengumpulan data yang menggunakan teknik deskriptif serta focus pada Pencegahan Penyebaran Informasi.

1.5 Tujuan

Menurut dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk Mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penyebaran berita hoaks dan Mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Poso dalam menangani kasus penyebaran hoaks.

³ Sabri. (2021). Strategi Komunikasi Dinas Kominfo Sul-Sel Dalam Pencegahan Penyebaran Informasi Hoax di Media Sosial. 1–89.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif⁴. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan membuat kesimpulan⁵.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Informan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan secara *purposive sampling*⁶ dalam teknik wawancara, Sehingga peneliti dapat mempertimbangkan informan mana yang cocok untuk menambahkan data pada fenomena yang sedang diteliti. Berikut daftar informan dalam penelitian ini:

No.	Informan	Jumlah Informan
1	Kepala Dinas komunikasi informasi	1
2	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1
3	Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Data Center, TIK Dan E-Government	1
4	Seksi Komunikasi Publik	1
5	Seksi Layanan Informasi Publik	2
6	Pengguna Media Sosial Facebook, Twitter,Whatsaap	5
Jumlah		12

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2022

Informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung serta terlibat, sehingga dipercaya dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada peneliti.

3.2 Strategi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso dalam menangani kasus penyebaran Hoaks

⁴ W, Cresswell. J. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif

⁵ Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

⁶ Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Penyebaran informasi hoaks terjadi dalam beberapa bentuk yaitu tulisan, gambar, dan video. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan diskominfo dalam menangani penyebaran hoaks peneliti menggunakan teori Strategi menurut James Brian Quinn⁷ dengan menggunakan Dimensi dan Indikatornya seperti berikut:

3.3 Tujuan

A. Program

Dengan pembuatan akun media sosial resmi (Instagram: @kominfosandi_posokab, Facebook: Kominfosandi Poso, Web: posokab.go.id, Youtube: Dinas Kominfo Dan Persandian Kabupaten Poso) masyarakat lebih paham mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah karena diketahui bahwa masyarakat kebanyakan termakan hoaks melalui media sosial yang sudah di share hingga berkali-kali. Dengan adanya website resmi ini pemerintah dapat menyebarkan informasi yang valid tanpa harus menyebarkan menggunakan cara yang manual sehingga masyarakat tidak mudah termakan informasi hoaks. Dinas kominfo sudah siap dalam memberantas hoaks dilihat dari program yang dibuat khusus oleh Dinas kominfo dalam mengatasi informasi hoaks yang tidak tau kapan saja datangnya hal ini juga terbukti melalui media sosial yang selalu Update mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dan pengembangan aplikasi SP4NLAPOR yang sudah cukup bagus.

B. Upaya

Penyebaran berita hoaks kebanyakan terjadi di media sosial dalam 2 tahun terakhir. Whatsapp merupakan aplikasi yang paling banyak di akses di Kabupaten Poso dengan presentase 93,8% dari jumlah rata-rata pengguna sosial media. Akan tetapi aplikasi whatsapp juga merupakan media sosial yang paling banyak menyebarkan informasi hoaks tidak hanya berupa tulisan tetapi juga dalam bentuk video dan gambar. penyebaran hoaks dalam bentuk tulisan dan gambar kebanyakan ditemukan di grup whatsapp dan facebook, dan penyebaran hoaks melalui video biasa di temukan di media sosial instagram lebih lengkapnya bisa dilihat dari data tabel mengenai media sosial dan bentuk penyebaran berita hoaksnya:

Tabel 3. 1
Bentuk Berita Hoaks

⁷ James Brian Quinn, dan Jhon Voyer, "The Strategy Process". London: Prentice Hall International, Inc., 1998.

NO	Media Sosial	Bentuk Berita Hoaks
1	Facebook	Tulisan,gambar,video
2	Whatsapp	Tulisan,video
3	Instagram	Gambar,video

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Poso, 2023

Dinas Kominfo melakukan upaya penanganan hoaks di media sosial dengan menggunakan strategi penyiaran melalui media cetak, televisi, elektronik dan media online. Strategi penyiaran dilakukan dengan cara menyalurkan informasi menggunakan TV dengan siaran lokal dan radio yang memuat iklan masyarakat mengenai informasi palsu serta cara-cara dalam menangani hoaks, sehingga masyarakat bisa terhindar dari hal-hal yang menimbulkan kekacauan.

C. Relevan

Relevan mempunyai arti yaitu sebuah hal yang berkaitan atau bersangkutan paut. Dalam hal ini kata relevan digunakan untuk mencari tahu mengenai relevansi informasi yang di sebarakan diskominfo dengan yang di terima masyarakat. Informasi yang di sampaikan oleh Dinas Kominfo sudah relevan dengan informasi yang di terima oleh masyarakat setempat akan tetapi sedikit tambahan dari masyarakat mengenai update informasi yang tergolong lambat diharapkan menjadi perbaikan diskominfo kedepannya.

3.4 Kebijakan

A. Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional merupakan kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penyebaran informasi hoaks juga sudah tersebar di seluruh wilayah di Indonesia bahkan sampai ke pelosok-pelosok pun pasti informasi hoaks pernah ada sehingga pemerintah pusat juga ikut dalam memberantas hoaks.

Keseriusan pemerintah dalam menangani hoaks bisa dilihat dari website resmi kementerian komunikasi dan informatika republik Indonesia yang menjelaskan bahwa Pemerintah bersama stakeholders berusaha melakukan upaya pengawasan kasus penyebaran berita hoax. Dirjen informasi publik Rosita Niken Widiastuty juga menambahkan bahwa “bila ada

informasi yang salah tolong diluruskan dengan membuat informasi yang berisi tentang kebenaran sesungguhnya” Kemudian masyarakat dihimbau agar melapor kasus informasi hoaks ke pihak kepolisian dengan jerat undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: siapa pun masyarakat yang membuat konten negatif, ujaran kebencian, hoax dan menyebarkannya bisa dikenakan hukuman tahanan dan denda.

Hukum pidana bagi oknum penyebar informasi hoaks yang tertulis dalam Pasal 45A ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: (1) Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi hoax dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 317 KUHP dan Pasal 318 KUHP, yaitu: Pasal 317 KUHP yang berbunyi 1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan tuduhan atau memberikan keterangan palsu kepada penguasa, baik secara lisan atau tulisan, tentang seseorang yang mengakibatkan kehormatan atau nama baiknya terserang, maka pelaku divonis melakukan pengaduan fitnah, dengan sanksi penjara dengan minimal empat tahun.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa informasi hoaks tidak hanya terjadi di Kabupaten Poso saja akan tetapi di seluru wilayah indonesia sudah terkena dampak dari informasi hoaks tersebut. Akan tetapi dengan adanya kebijakan nasional dan penjelasan dirjen Dirjen kominfo diharapkan masyarakat mampu mengetasi masalah hoaks tersebut.

B. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah daerah adalah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, Kabupaten/kota, atau desa. Kebijakan daerah dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Poso telah mempunyai kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Bupati Poso Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatikan Dan Persandian yang mempunyai tugas membantu bupati sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang komunikasi, Informatika.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat sudah mengetahui informasi yang disampaikan oleh pemerintah baik menggunakan media iklan ataupun menggunakan media sosial ditambah lagi masyarakat juga sudah mengetahui mengenai sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hoaks dengan harapan penyebar informasi hoaks semakin hari semakin berkurang.

Kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan aparat pemerintah daerah dan warga masyarakat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa telah ada kebijakan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah terkait upaya pencegahan penyebaran informasi hoaks, bahkan kebijakan tersebut sudah mengatur secara teknis terkait sanksi atas pelanggar hoaks dan telah disosialisasikan pada warga masyarakat secara umum.

3.5 Program

A. Rencana Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yang lebih umum dan belum terperinci, dengan tujuan untuk memberi patokan target yang jelas bagi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Berkaitan dengan program Perencanaan jangka panjang, tertuang dalam perjanjian kinerja antara Bupati Poso dan Kepala Dinas yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Poso. Dalam kaitannya Indikator Kinerja Utama dan Program Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Poso sampai dengan 31 Oktober 2023.

Untuk menunjang Indikator Kinerja Utama tersebut diatas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Poso melaksanakan program kegiatan yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan kualitas dan kinerja pemerintah daerah dalam cakupan pelayanan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan meningkatnya Nilai Sakip OPD. Program Informasi dan Komunikasi Publik Layanan Publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah Program Aplikasi Informatika Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan Perangkat

Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan Telah tersusunnya Arsitektur SPBE/Masterplan e-Government yang menjadi bahan pertimbangan dan acuan tata kelola dalam pembangunan dan pengimplementasian TIK di Kabupaten Poso. Penyediaan jaringan komunikasi berbasis IT Pengembangan dan pembangunan jaringan telekomunikasi berbasis fiber optic (FO) telah terbangun secara merata di semua OPD dan beberapa titik Area publik untuk penggunaan Wifi Gratis. Program Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi Tingkat Keamanan Informasi pemerintah Confidentialty (Kerahasian), Integrtty (Integritas), Availability (Ketersediaan) Program Penyelenggaran Statistik Sektoral Pengumpulan dan Penyusunan data sectoral Kabupaten Poso Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan melakukan evaluasi pembangunan daerah.

Berdasarkan informasi hasil wawancara dan data dokumentasi hasil penelitian terkait program dimaksud, terlihat bahwa dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Dinas Kominfo menetapkan tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi khususnya Misi ke 7 (tujuh) “POSO BERSINAR DAN TERDEPAN” yaitu Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan Infrastruktur yang terdepan dan merata di seluruh wilayah. Selanjutnya disusunlah Program Prioritas Kabupaten Poso tahun 2021-2026 sebagai formulasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Poso yaitu “Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah serta penyediaan Wifi Gratis“. Sedangkan rencana jangka pendek yang akan dilakukan diskominfo dalam menanggapi hoaks adalah dengan melakukan sosialisasi secara terpadu dan menyeluruh.

B. Edukasi

Dalam menangani kasus hoaks di Kabupaten Poso pemerintah melakukan salah program yaitu melalui edukasi. Edukasi sendiri dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi baik secara formal ataupun non formal dengan tujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan mengenai ciri-ciri informasi hoaks dan cara menangani hal tersebut. Pemerintah Kabupaten Poso melakukan edukasi berupa sosialisasi melalui sosial media yang selalu diupdate serta memperkuat PPID untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. kemudian pemerintah juga menyebarkan informasi dibantu dengan kelompok informasi masyarakat (KIM). dinas kominfo sudah melakukan edukasi menggunakan median sosial online dan hal itu sudah

tersampaikan kemasyarakat dan bisa membantu masyaaakat dalam mengetahui informasi hoaks yang bersedar di media sosial.

C. Sumber Daya

Dinas komunikasi informatika dan persandian Kabupaten Poso memiliki sumberdaya manusia yang cukup Untuk mencapai visi dan misi Dinas kominfo.

Tabel 3. 2
Data ASN Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No	Pangkat	Gol/ Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	2	-	2
3	Pembina	IV/a	1	-	1
4	Penata Tingkat I	III/d	6	5	11
5	Penata	III/c	3	2	5
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	4	1	5
7	Penata muda	III/a	5	-	5
8	Pengatur tingkat I	II/d	3	1	4
9	Pengatur	II/c	1	1	2
10	Pengatur Muda	II/a	-	1	1
Jumlah			26	11	37

Sumber: Dinas kominfo Poso 2023

Tabel 3. 3
Data Keseluruhan Pegawai Diskominfo.

No	Jenis Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	ASN	26	11	37
2	Tenaga Honorer	19	11	30
Jumlah		45	22	67

Sumber: Dinas kominfo Poso 2023

Dari tabel data pegawai dan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia aparatur didinas Kominfo berjumlah 67 orang yang terdiri dari 37 orang ASN dan 30 orang tenaga kerja honorer. Adapun dari 37 orang ASN yang ada pangkat dan golongannya terdiri atas 1 golongan IV/c, 2 orang golongan IV/b, 1 orang golongan IV/a, 11 orang golongan III/d, 5 orang golongan III/c, 5 orang golongan III/b, 5 orang golongan III/a, 4 orang golongan II/d, 2 orang golongan II/c, dan 1 orang golongan II/a. Data ini menunjukkan bahwa dinas kominfo sudah memanfaatkan sumber daya manusia yang ada karena mereka sadar bahwa sebuah organisasi pasti memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, supaya sistem tersebut dapat berjalan sesuai yang semestinya.

3.6 Faktor Penyebab Terjadinya Berita Hoaks

Kemajuan teknologi sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yaitu sebagai alat untuk mencari dan menerima informasi dengan mudah ditambah lagi perkembangan teknologi yang membuat media sosial semakin lama semakin mudah di gunakan. Kemudahan tersebut membuat segala informasi di media sosial bisa di akses seluru masyarakat tanpa adanya batasan usia hal ini pula yang membuat sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab membuat sebuah informasi bohong kemudian di sebarkan yang berdampak buruk kepada pengguna media soaial, tindakan ini jelas bertolak belakang dengan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil wawancara menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu faktor terjadinya penyebaran hoaks seseorang dengan mudahnya menggunakan media sosial menyebabkan informasi hoaks bisa tersebar kemana saja.

Penyebaran berita hoaks semakin berkembang pada musim politik, Di tahun politik semakin banyak menunjukkan pengaruh dan efek yang negatif bagi persatuan dan kesatuang bangsa. Beredarnya berita bohong, palsu, fitnah atau hoaks, sudah menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat, karena segala informasi sudah dianggap berita yang benar. Sementara, masyarakat juga tidak memiliki pengetahuan dan sumber informasi yang cukup, untuk membedakan informasi atau berita yang diperolehnya benar atau salah. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab atas peneyebaran berita hoaks ini. Dalam musim politik terdapat banyak grup-grup yang dimiliki calon yang digunakan menyerang lawan untuk menjatuhkannya dengan menyebarkan informasi yang meresahkan beberapa pengguna media sosial. Dengan mudahnya pelaku menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah.

3.7 Diskusi Mengenai Kebaharuan Temuan pada Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai Strategi Diskominfo dalam menangani hoaks di Kabupaten Poso, maka ada beberapa saran yang penulis berikan sehingga dapat dijadikan masukan sebagai evaluasi sebagai berikut :

Diharapkan agar masyarakat Poso lebih mengetahui mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya informasi hoaks ditambah lagi dalam musim politik diaharpak masyarakat tidak terprovokasi oleh beberapa oknum penyebar informasi hoaks. Diharapkan bagi dinas Kominfo agar dapat membuat sebuah aplikasi khusus untuk mengetahui ciri-ciri penyebaran hoaks dan sebagai portal buat masyarakat untuk melaporkan jika adanya penyebaran hoaks di lingkungan masyarakat, sehingga bisa meminimalisir penyebaran informasi hoaks. Diharapkan agar dinas Kominfo dapat membuat kebijakan-kebijakan terbaru guna menanganni penyebaran hoaks di masyarakat serta menetapkan sanksi-sanksib tegas terkait pelanggaran informasi hoaks. Diharapkan agar Dinas Kominfo terus Melakukan sosialisasi rutin dan bertahap kepada masyarakat terkait pentingnya penanganan informasi hoaks bukan hanya melalui media online tetapi diharapkan bisa melalui edukasi yang dilakukan secara langsung.

3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian terdahulu yang di publikasi oleh Devi berjudul "Upaya Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Dalam Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Media Online Di Samarinda" perbedaan penelitian yang dilakukan adalah upaya dalam penanganan hoaks yang menggunakan teknik sosialisasi. Kemudian perbedaan penelitian yang dilakukan sekarang adalah lebih memfokuskan kepada strategi diskominfo dalam menangani berita hoax dengan tujuan adalah untuk menjelaskan upaya pengurangi penyebaran berita bohong (hoax) pada media online. Dan penekanan langkah yang akan diteliti berupa langkah pencegahan yang lebih preventif. Kesamaan dari penelitian yaitu metode penanganan informasi hoax oleh dinas kominfo kota samarinda dengan melakuakn Program Iklan layanan masyarakat agar masyarakat lebih teliti dalam menerima informasi atau isu-isu yang sedang viral

IV. KESIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi penyebaran hoaks adalah perkembangan teknologi yang pesat sehingga informasi sangat mudah tersebar, kemudahan tersebut digunakan sekelompok orang untuk menyebarkan berita hoaks yang kebanyakan di temukan di media sosial. Faktor selanjutnya adalah politik dengan Penyebaran rata-rata dilakukan dengan sadar mempunyai tujuan memprovokasikan masyarakat sehingga terjadi kegaduan di lingkungan masyarakat. Ditinjau dari program dan upaya yang dibuat oleh Diskominfo bahwa prinsipnya sudah terlaksana dengan baik dengan membuat akun resmi media sosial pemerintah daerah, menjalin kerjasama pemerintah daerah dengan media cetak dan media elektronik serta mengembangkan dan mengaktifkan berbagai aplikasi akan tetapi Dinas Kominfo mempunyai kekurangan yaitu belum adanya sebuah Aplikasi khusus yang dibuat untuk menangani kasus penyebaran hoaks Dalam dimensi kebijakan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Poso sudah menetapkan kebijakan dengan baik, yaitu berupa kebijakan nasional ataupun kebijakan daerah. Masyarakat Kabupaten Poso juga sudah mengetahui adanya kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah namun pemerintah Kabupaten Poso belum memaksimalkan kebijakannya sehingga masih ditemukan beberapa kekurangan didalamnya. Berdasarkan dimensi program Dinas Kominfo sudah melakukan penanganan hoaks dengan baik dilihat dari indikator Perencanaan jangka panjang dan pendek, Edukasi melalui sosialisasi yang dilakukan, serta pemanfaatan sumberdaya manusia yang maksimal. akan tetapi dalam perencanaan edukasi kebanyakan masih dilakukan hanya melalui media online saja sehingga masyarakat yang tidak menggunakan sosial media akan sulit dalam menerima informasi mengenai hoaks

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan pada penelitian ini adalah kurangnya durasi untuk menggali lebih dalam keadaan di lapangan.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work): Peneliti menyadari dalam penelitian ini merupakan temuan awal yang dilakukan oleh peneliti sehingga masih perlu diteliti lebih lanjut mengenai Strategi Penanganan Penyebaran Informasi Hoaks Di Media Sosial Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Segenap Aparatur Sipil Negara Dinas komunikasi informatika Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah yang dengan ikhlas membantu dengan kemurahan hati dan kerja samanya telah bersedia membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi dan sebagai tempat peneliti untuk sharing ketika mengalami kesulitan semua narasumber yang masih menyempatkan waktu untuk menerima peneliti melakukan wawancara serta ketika peneliti membutuhkan informasi dalam penelitian skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arsiandi. (2019). Strategi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Dalam Menangani Berita Hoax Di Lembaga Penyiaran Publik. 5–10.
- Devi, N. A. R. (2019). Upaya Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Dalam Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Media Online Di Samarinda. Ejournal, 7(4), 1553–1566.
- James Brian Quinn, dan Jhon Voyer, “The Strategy Process”. London: Prentice Hall International, Inc., 1998.
- Sabri. (2021). Strategi Komunikasi Dinas Kominfo Sul-Sel Dalam Pencegahan Penyebaran Informasi Hoax di Media Sosial. 1–89.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- W, Cresswell. J. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif,

